



**BENGKULU TENGAH**

**KAMIS, 19 AGUSTUS 2021**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Polisi Periksa Mantan Kadisnakertrans**

**BENTENG** - Dugaan korupsi PAD retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus digeber penyidik Satreskrim Polres Bengkulu Tengah (Benteng). Diketahui pada saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Yang mana dari 15 saksi tersebut salah satunya mantan Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans pada tahun 2017 lalu yakni HB.

Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH melalui Kasat Reskrim, Iptu. Iman Falucky, S.TR, S.IK menjelaskan, pada saat ini pihaknya terus mengumpulkan data-data dan bukti-bukti mengenai dugaan tindak pidana korupsi terhadap PAD retribusi TKA. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap

15 saksi. Yang mana 15 orang saksi ini berdasarkan dari kalangan yang berbeda-beda.

"Sudah ada 15 saksi diperiksa, salah satunya mantan Kadis Nakertrans pada tahun 2017 lalu sudah kita periksa, mantan Kabid yang sudah Dinas diluar Kabupaten Benteng. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi ahli ditiga Kementerian. Yang mana tujuh saksi ini terdiri dari saksi ahli Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dua orang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tiga orang dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak dua orang," ujarnya.

Ia memastikan, akan terus gencar melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini dan pihaknya masih akan terus meng-

umpulkan data-data. Untuk diketahui dalam dugaan tindak pidana korupsi retribusi PAD TKA, pihaknya melakukan penyelidikan untuk retribusi PAD TKA dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Sebab pihaknya mempertanyakan uang retribusi PAD TKA dari tahun 2016 hingga tahun 2019 tersebut dikirim ke rekening siapa dan kemana uang tersebut.

"Karena pada tahun 2019 lalu, Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi PAD TKA tersebut harus ditransfer ke rekening Kas Daerah (Kasda) Benteng baru terbit. Maka PAD TKA retribusi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang kita pertanyakan kemana uang tersebut, sedangkan perusahaan dari tahun 2016 hingga 2019 sudah menyetorkan uang tersebut. Ini yang sedang

kita selidiki dan terus mencari data dalam pengusutan kasus dugaan korupsi ini," tegasnya.

Lanjutnya, Untuk kerugian negara pada saat ini pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Bengkulu. Meminta mereka melakukan audit dan menghitung kerugian negara dalam dugaan penyelewengan PAD retribusi TKA ini. "Apabila nanti sudah ada hasil dan ada nominal pasti berapa kerugian negaranya, maka akan kita beritahu dan umumkan kepada semua rekan media. Selain itu dalam penyelidikan kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi, yakni tiga pejabat yang pernah menjabat di OPD tersebut dari tahun 2016 hingga 2019 yang lalu," Tutup Iman. (jee)